

## Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi aset kripto berdasarkan peraturan yang sudah ada pada saat ini. Serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi aset kripto. Peraturan mengenai penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dan juga dijadikannya kripto menjadi sebuah aset yang dapat diperdagangkan di dalam bursa berjangka juga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Perlu diketahui juga bahwa peraturan paling baru mengenai transaksi aset kripto telah ditetapkan yaitu Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021, namun dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini masih mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan BAPPBETI No. 5 Tahun 2019. Prospek yang ditawarkan oleh produk digital tersebut dapat dibilang menjanjikan. Namun perlu diingat bahwa aset kripto termasuk aset yang termasuk memiliki resiko yang tinggi dikarenakan harganya yang fluktuatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan transaksi aset kripto di Indonesia saat ini sudah berjalan dengan lancar dan juga bentuk perlindungan hukum bagi konsumen telah terpenuhi. Bentuk perlindungan preventif dalam hal ini salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta bukti perlindungan represif salah satunya adalah tersedianya BAKTI sebagai badan yang ditunjuk oleh BAPPEBTI untuk mengatasi sengketa yang terjadi dalam transaksi aset kripto.

Kata Kunci : Transaksi, Aset Kripto, Perlindungan Hukum

## Abstract

*This study aims to find out how crypto asset transactions are carried out based on current regulations. As well as analyzing how the legal protection for consumers in crypto asset transactions. In this study, the theory of preventive and repressive legal protection is used. Regulations regarding the implementation of the physical market for crypto assets and also making crypto into an asset that can be traded on the futures exchange have also been set by the government. It should also be noted that the most recent regulation regarding crypto asset transactions has been enacted, namely BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021, but the legal basis used in this research still refers to the previous regulation, namely BAPPBETI Regulation No. 5 of 2019. The prospects offered by these digital products can be said to be promising. However, keep in mind that crypto assets include assets that have a high risk due to their volatile prices. The results of this study indicate that the implementation of crypto asset transactions in Indonesia is currently running smoothly and also forms of legal protection for consumers have been fulfilled. One form of preventive protection in this case is to apply the principles of good corporate governance and evidence of repressive protection, one of which is the availability of BAKTI as an agency appointed by BAPPEBTI to resolve disputes that occur in crypto asset transactions.*

*Keywords: Transactions, Crypto Assets, Legal Protection*

Alisya Nur Hidayah Rizki, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI ASET KRIPTO

UPN Veteran Jakarta

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]